

## **SKRIPSI**

# **PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SENDIRI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD RESHA TENRIBALI SIREGAR**

**B 111 11 910**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam  
Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh  
Keluarga Sendiri**

**Oleh**

**MUHAMMAD RESHA TENRIBALI SIREGAR**

**B 111 11 910**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SENDIRI**

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RESHA TENRIBALI SIREGAR**

**B11111910**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 20 Oktober 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.**

NIP. 19680411 199203 1 003

**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**

NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD RESHA TENRIBALI SIREGAR**  
Nomor Pokok : B 111 11 910  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Proposal : PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH KELUARGA SENDIRI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Makassar, 6 Agustus 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.**  
NIP. 196804111992031003



**Hj. NurAzisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002



## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

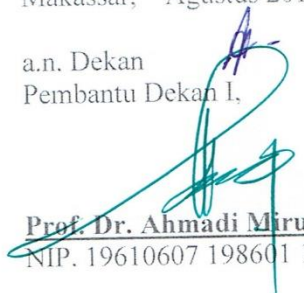
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD RESHA TENRIBALI SIREGAR**  
No. Pokok : B111 11 910  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
(LPSK) dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan  
Seksual Yang Dilakukan oleh Keluarga Sendiri

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2015

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**Muhammad Resha Tenribali Siregar (B11111910), Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Keluarga Sendiri, Dibimbing oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kekerasan seksual.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan beberapa pejabat instansi terkait yang berwenang untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU PSK mengenai hak korban pada umumnya jo. Pasal 10 UU PKDRT mengenai hak korban KDRT. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. *Kedua* UU PSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan, kemudian dalam UU PSK juga tidak diatur tentang cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK juga tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual sebagai bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan insiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sendiri” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **H. Suharto Siregar, S.E., M.si.** dan Ibunda **Hj. Risnayanti Andi Djamro, S.E.** dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada Penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian Penulis selama ini tidak bisa lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan Skripsi ini:



Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I (satu) dan **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan Skripsi. Terima kasih pula kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

- Terima kasih kepada **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- Terima kasih kepada **Prof. Dr. Farida, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.,** dan **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Terima kasih kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.,** dan **Prof. Andi Sofyan S.H., M.H.** selaku Dewan penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

- Terima kasih kepada Pembimbing Akademik penulis **Dr. Abdullah Masba Magassing, S.H., M.H.** dan segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menuangkan ilmu kepada Penulis sejak kuliah sampai sekarang.
- Terima kasih kepada seluruh narasumber serta seluruh pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi ini.
- Terima kasih kepada **Opung drh. Gaus Siregar** dan **Nenek** dari **Keluarga Cendrawasih** dan **Pappi' Jamro** dan **Mammi'** dari **keluarga Landak Baru** dengan kasih sayang yang tulus memberikan perhatian kepada para cucu-cucu nya dan merawat penulis dari dulu hingga sekarang. Betapa Penulis bersyukur atas semua yang diberikan selama ini.
- Terima kasih kepada para sepupuku tersayang **Abang Ade, Galih, Otto, Fina, Rangga, Feyza Alayda, Nayla, Naya, Relly, Axel, Filza, Habibi dan Aimar** yang sudah menemani penulis ketika berlibur maupun sehari-hari.
- Terima kasih kepada saudara-saudara penulis **Muhammad Anggara Tenriatta Siregar** dan **Almira Tenrifada Siregar** yang memberikan dorongan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.

- Kepada sahabat-sahabat kuliah **MEDIASI 2011** penulis, terima kasih atas berbagai pengalaman bersama penulis, setia menemani dan memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis dalam waktu susah maupun senang.
- Terima Kasih kepada para senior sekaligus sahabat penulis **Muhammad Fadhil, S.H., Andi Iswan Randie Poetra, S.H., Raditya D. Setiawan S.H., Adnan Darmansyah, S.H., Andi Akbar Tenritetta Pananrang, S.H., Achsan Rumi, S.H., Zainul Alim, S.H., Djaelani Prasetya, S.H., Ridwan Saleh, S.H., Muchtadin Al Attas, S.H., Rio Adriano Tangkau, Hartono Tasir Irwanto, Wildan Saefullah** yang telah mendidik dan mengajarkan penulis begitu banyak ilmu dan hal-hal lainnya selama penulis duduk di bangku kuliah. Terima kasih atas kesediaanya untuk selalu membantu kanda.
- . Kepada adinda seperjuangan penulis yang tergabung dalam tim *Moot Court Competition* (MCC) **Wahyu Hidayat, Zulfikar Rahman, Iriansyah T. Tjoteng, Ichwanul Reiza, Riskayanti, Putri Radiyanti Harifin, Giovanni Lie, Azhima Maricar, Muhammad Iqbal, Putri Irmayanti, Aswal Reza, Ahmad Tojiwa Ram, Afdal Yanuar, Irsad, Khaiffah Khairunnisa, Pratita Nareswari, Hj. Dhean Furqani, Lisa, Afdal Syahrir, Irsad, Nurul Apriliani, Feny Septy Arista.** Terima kasih atas kerjasama dan usaha yang telah dilakukan bersama penulis untuk meraih prestasi.

- Terima kasih kepada Keluarga Besar **Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)** dan **Organisasi Studi dan Aktualisasi Pancasila (ORASI)** yang telah menjadi teman baik, dan memberikan banyak pelajaran hidup tentang kerjasama dan manajemen organisasi yang baik kepada Penulis.
- Terima kasih kepada teman KKN Gelombang 87 Unhas khususnya Kab. Enrekang, Kec. Enrekang Kota, Kelurahan Tuara **Samsul Bahri, Adi, Andi Besse Nur Alang, Esse** dan **Yuni** atas pengalaman baru yang diberikan selama KKN.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan dan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 13 Oktober 2015

**Muhammad Resha Tenribali Siregar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Beberapa Pengertian .....	8
1. Perlindungan Hukum .....	8
2. Saksi.....	10
3. Korban .....	12
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	14
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	14
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban.....	18
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	19
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	21
1. Tugas dan Kewenangan LPSK.....	21
2. Koordinasi LPSK dengan Instansi Terkait Perihal Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban .....	23
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Upaya Perlindungan hukum yang Diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Keluarga Sendiri .....	30
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Kekerasan Seksual .....	41
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang masih berlaku saat ini adalah sistem hukum yang berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”.<sup>1</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga belas prinsip pokok negara hukum sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut negara hukum (*the rule of law*), yaitu:<sup>2</sup> (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*); (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); (4)

---

<sup>1</sup> Lihat aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

Pembatasan Kekuasaan; (5) Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); (12) Transparansi dan Kontrol Sosial; (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum adalah menjamin keadilan kepada warga negaranya termasuk menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai salah satu produk hukum nasional lahir untuk memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia dan menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Aturan hukum pada hakikatnya dibentuk untuk mengatur hidup dan mempermudah hidup manusia. Jadi selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, *ubi societas ubi ius*, dimana ada manusia disitu ada hukum.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peran penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan masyarakat yang harmonis serta menciptakan sebuah tata sosial yang damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum pidana terbagi menjadi dua



bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam KUHP. Sedangkan, hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil dan diatur dalam KUHP.

Berkaitan dengan hukum pidana materiil, kedudukan seorang pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Hal ini muncul karena di masa lalu, khususnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, muncul berbagai sorotan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ironisnya, dengan banyaknya materi KUHP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. Padahal, sejatinya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan seperti yang dimaksud dalam asas *equality before the law* yang berarti setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan dengan hak-hak asasi, maka ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak

tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>3</sup> Kita lupa bahwa manusia yang menjadi korban kejahatan itu telah lebih dulu dirampas hak asasinya oleh perilaku yang mengedepankan kebiadaban. Ada pengingkaran normatif yang dibenarkan, dijadikan pilihan dan jalan tembus untuk memenuhi nafsu dan keserakahan.

Masyarakat Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan dengan beragam persoalan sensitif mulai dari diskriminasi *gender*, hak-hak di bidang reproduksi, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan diadvokasi dari bahaya kejahatan tindak pidana kesusilaan. Berkaitan dengan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini pun tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan kekerasan termasuk korban kekerasan seksual, maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian lebih disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hal. 33.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan LPSK sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban, setidaknya memberi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM atau tindak kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual untuk lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologis peristiwa yang dialaminya dari tindak pidana yang kerap kali terjadi bahkan di lingkungan yang tidak disangka-sangka akan terjadi usaha untuk merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan dengan kekerasan seksual seperti dalam lingkup keluarga sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis kemudian mengkaji tugas pokok dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sendiri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kekerasan seksual

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum serta memberikan

kontribusi pemikiran bagi penulis sebagai peneliti maupun peneliti selanjutnya.

2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya tentang fungsi dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta perannya dalam sistem penegakan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Pengertian**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Keterangan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana adalah salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan keterangan saksi atau korban dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan sehingga kebenaran materiil dari sebuah kasus bisa terungkap. Tuntutan dari keberadaan saksi atau korban adalah saat memberikan keterangannya, dia dapat memberikan keterangan yang sebenar – benarnya. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya di persidangan, saksi atau korban ini berada dibawah tekanan atau takut keterangan yang diberikannya akan berakibat buruk terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya.

Oleh karena itu untuk terciptanya rasa aman bagi para saksi dan korban, pemerintah menjamin sebuah perlindungan yang diberikan oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Defenisi

Perlindungan Hukum yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

**A. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

**B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini.<sup>5</sup>

## **2. Saksi**

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Defenisi saksi telah banyak dituliskan dalam berbagai literatur peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahkan membagi saksi menjadi 2 yaitu, saksi dan saksi pelaku. Defenisi saksi sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>6</sup>

**b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

- 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



- 2) Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>8</sup>

Dalam praktek peradilan pidana, terdapat 2 jenis saksi yang disebut sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) dan saksi yang memberatkan (*a charge*). Saksi yang meringankan merupakan saksi yang dianjurkan oleh terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang ditujukan terhadap dirinya. Landasan hukum mengenai saksi yang meringankan telah diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang mengatakan: *“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”*. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: *“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”*

Sementara saksi yang memberatkan adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa dan diajukan oleh pihak penuntut umum. Hal – hal yang mengatur tentang saksi yang memberatkan disebutkan dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP, yaitu:

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;*
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;*
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

### **3. Korban**

Pengertian korban telah banyak dikemukakan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun para ahli yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut.

#### **a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

#### **b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

**c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya

**d. Arief Gosita**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

**e. V. V. Stanciu**

Orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 63.

<sup>10</sup> V. V. Stanciu, 1976, *Victim Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society*, Visage Press, Inc., Washington D.C., hal. 29.

**f. Siswanto Sunarso**

Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>11</sup>

**C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP diterangkan bahwa segala tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual tercantum dalam Buku Kedua Kejahatan BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni diatur pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 KUHP. KUHP sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan yang dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Sementara itu, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53.

siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan/kesusilaan itu sendiri dengan pelecehan seksual, pada akhirnya juga membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi seperti kasus pelecehan seksual di tempat kerja, jalanan, bis kota dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Selain itu, bila dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat), atau antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau bawahannya.

Sekalipun ketentuan ini dianggap sudah cukup melindungi mereka yang lemah karena adanya perbedaan kelas sosial dan usia, tetapi masih tetap mengandung kelemahan. Yakni tidak dapat menjangkau seluruh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di kendaraan umum, terminal, maupun pabrik-pabrik terhadap buruh perempuan oleh supervisinya atau sesama buruh pabrik. Hampir sama dengan kasus perkosaan, perbuatan cabul juga harus dibuktikan dengan apakah ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan cabul.

Perbedaan lebih jelas antara pasal pemerkosaan dan pencabulan terdapat pada unsur – unsur deliknya masing – masing. Bunyi dalam Pasal 285 KUHP yaitu: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*. Sementara dalam pasal 289 KUHP berbunyi: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”*.

Meskipun keduanya sama – sama kejahatan kekerasan seksual tetapi delik materiilnya berbeda.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dibahas dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: "*Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."*

Kekerasan seksual yang dimaksud pada pasal diatas ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain tidak untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban**

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan, yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>12</sup>
- b) Perlindungan Sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan<sup>13</sup>. Dalam hal menerima laporan atau mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dan diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Perlindungan diberikan kepada korban dalam waktu paling lama satu tahun<sup>14</sup> dan dapat diperpanjang dengan melakukan pengajuan

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Pasal 1 Angka 5

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1)



permohonan perpanjangan perintah perlindungan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.<sup>15</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

### **a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi;**

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, dalam penerapannya perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.<sup>16</sup> Sedangkan, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3)

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>17</sup>

b.      Konseling;<sup>18</sup>

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus – kasus menyangkut kesusilaan.

c.      Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis juga termasuk melakukan kepengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya hingga pengurusan jenazah hingga pemakaman.<sup>19</sup>

d.      Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>18</sup>Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapatkan nasihat hukum apabila diperlukan

e. Pemberian Informasi

Seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan, oleh karena itu sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi dan korban<sup>20</sup>. Informasi mengenai hasil dari putusan pengadilan juga menjadi hak saksi dan korban untuk mengetahuinya.<sup>21</sup> Ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari terdakwa juga cukup beralasan sehingga dia berhak tahu bahwa terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan<sup>22</sup>

## **E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

### **1. Tugas dan Kewenangan LPSK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah “sebuah lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di seluruh daerah sesuai keperluan”.<sup>23</sup> Dasar

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf f.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf g.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf h.

<sup>23</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan dan saksi dikarenakan para penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, padahal dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Berdasarkan politik hukum maka negara untuk kepentingan pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Maka, perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim. Dalam rangka penegakan keadilan hukum yang hendak dicapai juga ada nilai-nilai yang dipegang teguh sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban yaitu:<sup>24</sup> (1)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia; (2) Rasa Aman; (3) Keadilan; (4) Tidak Diskriminatif; (5) Kepastian Hukum.

## **2. Koordinasi LPSK dengan Instansi Terkait Perihal Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan perluasan jangkauan terhadap saksi dan korban yang harus dilindungi, maka LPSK mengeluarkan salah satu peraturan mengenai kerja sama antar lembaga terkait perlindungan saksi dan korban yaitu dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Instansi Terkait Yang Berwenang.

Adapun tujuan dari diadakannya Kerjasama LPSK dengan berbagai mitra instansi yang terkait dan berwenang adalah sebagai<sup>25</sup>:

- a. Penguatan kelembagaan khususnya untuk menggali, mengarahkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya, potensi, dan atau kemampuan guna penataan dan pemberdayaan kelembagaan LPSK;

---

<sup>25</sup> Pasal 2 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Instansi Terkait Yang Berwenang

- b. Upaya mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai langkah strategis yang akan dan sedang dilaksanakan LPSK yang dimungkinkan melibatkan para pihak dan atau ditentukan diberbagai daerah;
- c. Merumuskan, mengkordinasikan dan menghasilkan berbagai tata cara dan bermacam aktifitas dalam melakukan kegiatan perlindungan bagi para Saksi dan atau Korban, serta menentukan standart dan tolok ukur keberhasilannya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai langkah strategis dalam pemberian kompensasi, restitusi dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban yang melibatkan para pihak terkait dan berwenang;
- e. Aktivitas pengkajian dan pembentukan produk ketentuan hukum berkenaan dengan upaya pengembangan kelembagaan dan atau rencana program LPSK; dan;
- f. Upaya memberikan wacana dan advokasi terhadap aktivitas perlindungan Saksi dan Korban, pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja dalam melaksanakan kewenangan dan tupoksi LPSK, dan menjadikan komunikasi dan koordinasi untuk terlaksananya kewenangan dan atau tupoksi LPSK sesuai tanggung jawab yang ditentukan dalam norma yang telah ditetapkan.

LPSK juga dalam menjalankan kerjasama antar kelembagaan atau instansi terkait dalam pemberian perlindungan saksi dan korban mengacu kepada beberapa prinsip dasar atau nilai dasar, antara lain<sup>26</sup> :

- a. Kesetaraan dalam hubungan kemitraan antar kelembagaan;
- b. Kesepakatan berkenaan dengan kesamaan dasar pijakan;
- c. Keterbukaan dan saling memberikan manfaat antar kelembagaan;
- d. Mendasari berbagai ketentuan normatif/legal;
- e. Memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan masing-masing lembaga;
- f. Mewujudkan kinerja kerjasama kelembagaan pada kemauan bersama dalam mewujudkan keadilan para pihak, memberikan kemanfaatan dalam jalinan kerjasama, serta menentukan format kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun berbagai pihak/ instansi/ lembaga yang akan dan perlu dijadikan mitra kerjasama LPSK, antara lain<sup>27</sup> :

- a. Instansi dan atau Lembaga Pemerintah yang berinteraksi dan beraktifitas dalam pemenuhan potensi, kemampuan, dan atau fasilitas operasional, administrasi, maupun pendukung kerja (*auxillary*) LPSK;
- b. Asosiasi Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau para pihak yang mempunyai keterkaitan dan atau kewenangan untuk menyelenggarakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4)

dan atau melaksanakan aktivitas perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan atau Korban;

c. Korporate Jasa/Lembaga, Kampus, dan Penyelenggara Konstruksi Fasilitas Layanan serta para Pihak yang siap dan bersedia merealisasikan tupoksi dan kewenangan LPSK secara terbatas dalam hal-hal tertentu.

Terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan hak para saksi dan korban untuk menyuarakan kebenaran materiil dalam persidangan tidak akan tercapai sepenuhnya apabila hanya LPSK yang bertugas untuk mengawal perlindungan saksi dan korban. Maka, dengan adanya jalinan kerjasama dan bentuk koordinasi yang terjadi antara pihak LPSK dan lembaga terkait yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban maka hal ini bisa lebih memudahkan LPSK dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan fungsinya, baik yang menyangkut aspek operasional Perlindungan Saksi dan Korban maupun aspek administrasi pendukung bagi terlaksananya kegiatan operasional LPSK.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yakni Penulis mengumpulkan data-data, dimana data-data tersebut Penulis dapatkan dari Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban;

2. Wawancara, yakni mendatangi langsung sumber yang terkait dan mewawancarainya.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Yurisprudensi;
2. Karya ilmiah para sarjana;
3. Berbagai literatur; dan
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis.

**D. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar

membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sendiri**

Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat, terkhusus untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka berdasarkan Pasal

16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi wajib untuk memberikan perlindungan sementara pada korban dan dalam pemberian perlindungan pada korban polisi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi korban.

Untuk mengetahui jumlah kasus Kekerasan Seksual dalam wilayah rumah tangga, penulis melakukan penelitian di Kantor Polisi Resort Metro Jakarta Timur dan telah menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: (data di ambil pada 5 Juni 2015).

**Tabel 1**

**Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Tahun 2012-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Kekerasan Seksual Dalam Keluarga</b>
2012	4
2013	10
2014	5

2015	1
<b>Jumlah</b>	20

**Sumber Data:** *Unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur (5Juni 2015).*

Berdasarkan tabel tersebut jumlah Kasus Kekerasan Seksual dalam wilayah rumah tangga di Jakarta Timur selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2015 terdapat 20 kasus. Meskipun terhitung kecil, namun tingkat kerugian dan kriminalitas dari tindak pidana ini tidak berkurang sama sekali. segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dan dari hasil penelitian tersebut penulis juga mendapatkan Keterangan data berupa tersangka dan korban kasus kekerasan seksual dalam keluarga tahun 2012-2015.

**Tabel 2**

**Data tersangka dan korban kasus kekerasan seksual dalam keluarga tahun 2012-2015**

<b>No.</b>	<b>Nama Tersangka</b>	<b>Jenis Kela min</b>	<b>Tindak Pidana Pasal</b>	<b>Korban</b>	<b>Status Tersangka</b>
1.	Noviar	L	81/2002	Novi Dwi	

				(16)	Ayah Kandung
2.	Dedi Yarman	L	81/2002	Shella (18)	Ayah Kandung
3.	Zaini	L	81/2002	Winarni, Ristiani, Winarti	Ayah Kandung
4.	Endi S	L	81/2002	Mega Mulya (16)	Ayah Tiri
5.	Wanto	L	81/2002	Alfiana (14)	Ayah Angkat
6.	Deden Priyatna	L	81/2002	Puspita Dian (19)	Ayah Kandung
7.	Nurman	L	82/2002	Salsa Azzahra (10)	Ayah Tiri
8.	Mulyadi	L	46/2004	Mawarni (28)	Ayah Tiri

9.	Mangadu Pasaribu	L	81/2002	Melly Adriani (13)	Ayah Tiri
10.	Rudi Heriyanto	L	81/2002	Fitri Rayani (11)	Ayah Tiri
11.	Suhairi als Heri Lubis	L	81/2002	Lili Suryani (8)	Ayah Tiri
12.	Anton als Ahsun	L	81/2002	Partini (17)	Majikan
13.	Karsa	L	82/2002	Kusriyati (55)	Kakek Angkat
14.	Wartani	L	81/2002	Mila Nuraini (11)	Ayah Kandung
15.	M Nur Soleh	L	82/2002	Fauziyah Tri Annisa (2)	Paman
16.	Agus Jaya Idris	L	82/2002	Risti Azzahra	Ayah Tiri



				(13)	
17.	M Salman	L	81/2002	Yuliana (16)	Ayah Kandung
18.	Indriyoko	L	81/2002	Inis Rahma Susanti (14)	Ayah Kandung
19.	Durahman	L	81/2002	Dewi Sartika (17)	Ayah Angkat
20.	Jumadi als Roby	L	81/2002	Juleha (14)	Ayah Tiri

**Sumber Data:** Unit PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur (5 Juni 2015).

Dari 20 kasus kekerasan seksual dalam wilayah rumah tangga yang terjadi dari tahun 2012-2015, ada 18 kasus kekerasan seksual dimana tersangka diduga keras telah melakukan kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan hanya satu kasus kekerasan seksual yang tersangka melakukan pelanggaran atas Pasal 46

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu ada 1 kasus kekerasan seksual yang dihentikan penyidikannya dikarenakan si pelapor tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri LPSK belum pernah menangani kasus yang serupa sehingga LPSK tidak memiliki data tersebut namun berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap narasumber dari LPSK, tidak ada perbedaan standar operasional prosedur pelayanan dan perlindungan saksi atau korban yang berasal dari lingkungan keluarga sendiri ataupun bukan dalam hal kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis di LPSK mengalami keterhambatan dikarenakan kebutuhan akan data dan informasi status pemohon dan jenis layanan yang diberikan oleh LPSK merupakan informasi yang dikecualikan oleh publik dimana hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-241/I.DIV2.7/LPSK/VII/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

berdasarkan data yang Penulis dapatkan di LPSK maka ditemukan adanya sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh LPSK dan untuk mengetahuinya penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel data sebagai berikut:

(data di ambil pada 7 Juni 2015)

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Seksual LPSK April-Juni 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>
April	7
Mei	5
Juni	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

**Sumber Data:** *Bidang Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (7 Juni 2015).*

Berdasarkan tabel tersebut jumlah jenis kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh LPSK selama bulan April hingga Juni di tahun 2015 sebanyak 13 kasus.

Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan

untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Adapun syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UU PSK yaitu:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya. Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.

Berbicara mengenai upaya perlindungan hukum dari LPSK, penting kiranya dipahami bahwa perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Perlindungan sebagai bentuk pemenuhan hak kemudian mengacu pada hak-hak dari Saksi dan/atau Korban yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;

- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Semua hak tersebut akan dipenuhi oleh LPSK sebagai bentuk upaya perlindungan hukum yang merupakan tugasnya, namun tetap mempertimbangkan berbagai hal termasuk urgensi kasus dan urgensi pemenuhannya. Selain itu dalam kasus KDRT, maka LPSK juga akan mengacu pada Pasal 10 UU PKDRT yang merumuskan mengenai hak-hak korban. Namun bagaimanapun juga untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT, secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT,

sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.

**B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban Kekerasan Seksual**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHPA sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam KUHPA lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku.

Saksi, korban, dan pelapor perlu mendapat perlindungan hukum supaya mereka tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, ketika mereka diperlukan oleh penegak hukum membantu mengungkap kasus pidana, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan hukum



kepada mereka dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) dalam prinsip negara hukum saksi dan/atau korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Walaupun telah diundangkannya UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: UU Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan

dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam UU PSK ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam Pasal 33 - Pasal 36 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen di lingkungan pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.

Selain itu UU PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Serta belum terbentuknya LPSK di tiap-tiap daerah ditambah kewenangan LPSK yang hanya memberikan perlindungan hanya apabila ada permohonan membuat penanganan perlindungan terhadap saksi maupun korban yang berada di seluruh daerah di Indonesia belum maksimal.

LPSK adalah suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk urusan pemerintah . Dalam Hukum Administrasi, negara tidak bisa berhenti atau diam, negara tidak bisa menolak dengan alasan tidak ada aturan yang disebut *ultra viles* yaitu kewenangan pemerintah untuk hal yang sangat urgent dan perlu dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang horizontal. Kalau tidak diatur tentunya harus ada kesepakatan bersama atau diambil suatu kebijakan atau descretioner dalam konteks *ultra viles*, hal ini merupakan *base practice* atau *common practice* yang bisa dilakukan dimana-mana, artinya LPSK harus melakukan keperluan yang harus diputuskan dan tidak bertentangan dengan aturan. Namun terkadang dalam prakteknya pula, LPSK mendapat intervensi dari institusi-institusi lain dalam menjalankan tugasnya, terutama jika kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan institusi pemerintahan tertentu.

Selain itu dalam konteks kasus KDRT, kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti, karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga. Apalagi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, dalam pandangan masyarakat Indonesia, perbuatan

yang berhubungan dengan seksualitas masih dianggap tabu, termasuk untuk dibicarakan dan diketahui oleh orang lain. Sehingga ketika tindakan kekerasan seksual yang pada legalitasnya merupakan suatu tindak pidana yang ingin dicegah dan dihapuskan mendapatkan kendala-kendala dalam praktek pencegahan dan penghapusannya.

Begitupun dengan melindungi saksi korban, LPSK tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual sebagai bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan insiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK. Selain itu kendala yang biasa dialami oleh LPSK adalah lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Hasil visum merupakan alat bukti yang dapat sangat mendukung proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam konteks KDRT. Sehingga jika bekas luka yang sudah ada tidak segera divisum untuk tujuan pelaporan, maka hasil visum yang nantinya akan diperoleh menjadi tidak jelas dan dapat melemahkan posisi korban dalam proses hukum yang akan berjalan. Pada dasarnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, yang kelihatan lecet, padahal korban dipukulinya tiga bulan berturut-turut, misalnya.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian penulis, mayoritas perempuan korban KDRT cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Alasannya, mereka khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya. Hukum acara yang berlaku di lapangan juga masih menjadi hambatan untuk korban KDRT. Salah satu contohnya, menurut hasil wawancara penulis di LPSK, hukum acara mengenai alat bukti. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah, padahal analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang cukup kuat.

Kaidah pemidanaan dalam UU PKDRT juga masih menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44-Pasal 49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda ketimbang hukuman penjara. Pada hemat penulis bahwa hal ini sebetulnya akan sangat ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat-ringannya putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT. Untuk hal itu sangat diperlukan adanya pelatihan

untuk peningkatan sensitisasi gender di kalangan para hakim termasuk sensitisasi untuk keberpihakan pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada perempuan dan/atau anak.

Selanjutnya menurut penulis banyak sekali kasus kekerasan bersembunyi di dalam kasus-kasus perdata. Ternyata terbongkar bahwa banyak kasus perceraian dikarenakan adanya praktik kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, pengadilan agama tidak bisa memproses kasus kekerasan tersebut sehingga si korban harus berperkara di pengadilan dua kali hanya apabila korban berada dalam kondisi yang sangat khusus. seringkali pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk menentukan bahtera rumah tangga masyarakat menemukan adanya masalah-masalah KDRT. Di satu sisi, KDRT tidak dicantumkan secara tegas di dalam UU Perkawinan. Namun, di sisi lain, kekerasan itu sendiri dapat menjadi salah satu alasan perceraian. Makanya, seringkali pengadilan agama menemukan masalah-masalah KDRT. Meskipun KDRT terkuak dengan sangat jelas dan bisa dirasakan oleh masyarakat, tetapi pengadilan agama tidak bisa mengadili karena merupakan wewenang pengadilan pidana. Masalah KDRT memperlihatkan adanya irisan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata. Namun irisan ini juga yang kemudian menjadi penghambat dari diberantasnya KDRT dalam masyarakat.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pada tahun 2015 ini memasuki hitungan tahun kesebelas sejak pengundangan dan pemberlakuan atas UU PKDRT. Dalam pengaturannya, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh

korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian, masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat dirasakan adanya. Hal ini dapat diindikasikan, antara lain, masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan dark number atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap, maka hal ini menjadi sangat relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif.

Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian hukum bentuk tertulis memang kepastian hukum lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah untuk melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya. Untuk itulah dibutuhkan reintegrasi antar berbagai



peraturan perundang-undangan untuk ikut membantu pencegahan KDRT dan menjadi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam melindungi saksi korban KDRT. Karena keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU PSK mengenai hak korban pada umumnya jo. Pasal 10 UU PKDRT mengenai hak korban KDRT. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

2. UU PSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan, kemudian dalam UU PSK juga tidak diatur tentang cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK juga tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual sebagai bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan inisiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK.

## **B. Saran**

1. Dibutuhkan sosialisasi mengenai keberadaan, tugas, dan fungsi LPSK ke dalam masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak yang dapat mereka klaim ketika suatu saat menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam tindak pidana KDRT.
2. Dibutuhkan berbagai perbaikan baik dari segi legalitas materil maupun formil dalam kerangka pencegahan, penghapusan, dan perlindungan saksi korban kekerasan seksual tindak pidana KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.

Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Grafindo.

Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* Yogyakarta: Rangkang Education.

Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sisten Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana